



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADNAL NURBA TJENRENG
NIP : 197509262009121004
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Jakarta Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDANG ISTIANI
Jabatan : Ketua KPU Kota Jakarta Barat
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

ENDANG ISTIANI

Pihak Pertama,

**ADNAL NURBA TJENRENG
NIP. 197509262009121004**

PERJANJIAN KINERJA

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Jakarta Barat
Tahun : 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan pada Pemilu/Pemilihan.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih tepat waktu.	100%
2.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan.	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan Kelembagaan demokrasi.	3 lembaga
3.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Jakarta Barat yang efektif dan efisien.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
4.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Persentase penyusunan dokumen SAKIP.	100%
		Persentase penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.	100%
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Jakarta Barat.	Persentase penyampaian Reformasi Birokrasi dengan Tepat Waktu.	100%
6.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU.	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	100%
7.	Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM.	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Secara Tepat Waktu dan Akurat	100%
8.	Tersedianya data dan informasi pegawai KPU Kota Jakarta Barat.	Persentase pegawai yang dicatat secara akurat oleh data base KPU.	95%
9.	Terwujudnya pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilu/Pemilihan.	Persentase Badan Adhoc penyelenggara Pemilu yang telah terbentuk.	100%
10.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Kota Jakarta Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Persentase Penetapan Keputusan KPU Kota Jakarta Barat	100%

	undangan serta pendokumentasian informasi hukum		
		Persentase Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) melalui Media Sosial	80%
11	Terlaksananya Penanganan sengketa Hukum Pemilu/Pemilihan	Jumlah Penanganan Sengketa Hukum	2 laporan
12.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU Kota Jakarta Barat.	Persentase pelaksanaan SPIP secara efektif dan efisien.	100%
		Persentase penyusunan Laporan Keuangan yang dapat diandalkan	100%
		Persentase aset Negara yang tersimpan secara aman	100%
13.	Terwujudnya pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024	Persentase pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024	100%
14.	Terwujudnya pelaksanaan Tahapan Pilkada serentak tahun 2024	Persentase pelaksanaan Tahapan Pilkada serentak Tahun 2024	100%
15.	Tersedianya dokumen pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024	Persentase pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024	100%
16.	Terwujudnya dukungan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Persentase dukungan kegiatan sosialisasi Pendidikan pemilih Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024	100%
17.	Tewujudnya dukungan fasilitasi pelaksanaan kampanye Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024	Persentase dukungan fasilitasi pelaksanaan kampanye Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024	100%
18.	Tersusunnya laporan Bakohumas dan Siparmas tahun 2024	Jumlah dokumen laporan bakohumas dan siparmas Tahun 2024	2 laporan
19.	Tersedianya pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kota Jakarta Barat.	100%
20.	Terwujudnya system akuntansi dan pelaporan keuangan.	Persentase penyelesaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kota Jakarta Barat	100%
21.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase penyelesaian Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%
22.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	100%

23.	Terwujudnya peningkatan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip.	100%
24.	Terwujudnya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Persentase kekurangan dalam pemenuhan logistik	10%
		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan uang Negara.	100%
		Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah, mutu dan waktu.	100%
Kegiatan:		Anggaran:	
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.	Rp.	938.772.000,-
2.	Pembentukan Badan Adhoc.	Rp.	102.030.600.000,-
3.	Masa Kampanye Pemilu.	Rp.	369.630.000,-
4.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik.	Rp.	13.957.078.000,-
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.	16.548.091.000,-
6.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp.	8.832.000,-
7.	Penetapan Hasil Pemilu	Rp.	18.419.000,-
8.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.	2.496.501.000,-
9.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	323.496.000,-

Ketua KPU Kota Jakarta Barat,



ENDANG ISTIANTI

Jakarta, Januari 2024

Sekretaris KPU Kota Jakarta Barat,



ADNAL NURBA TJENRENG
NIP. 1909262009121004